

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pelaksanaan/Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.¹

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.² Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.³

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy*

¹Akib, Haedar dan Antonius Tarigan.” Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makasar, 2008, hlm 117.

²Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implenetasi and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-IIIionis, 1986, hlm 15.

³Edward III, George C (edited), *Publik Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 21.

output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.⁴

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang diamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada hakikatnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.⁵

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai actor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.⁶

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.⁷

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan

⁴Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implemetasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm 21.

⁵Agustino, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010, hlm 139.

⁶ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucray*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148.

⁷ Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Publik Policy*, Scott Foresmen and Company, USA, 1983, hlm. 139.

aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Teori-Teori Implementasi

Ada beberapa teori implementasi diantaranya :

a. Model Implementasi oleh George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang bersifat *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumber Daya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur Birokrasi.⁸

1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan kepada personalia yang tepat. Kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten, komunikasi (pentrasmisian informasi)

⁸ Edward III, George C (edited), *Publik Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Googin, Malcom L *et al.* 1990, hlm 149-154.

diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Menurut George C. Edward III terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi yaitu : a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miss communication*). b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.⁹

2) Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C. Edward III. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu : a) Staf ; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan

⁹ *Ibid.* hlm 149-154

adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, amak sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan

memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.¹⁰

3) Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal ini penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, menurut George C. Edward III adalah : a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambahkan keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.¹¹

¹⁰ *Ibid.* hlm 149-154

¹¹ Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 154.

4) Struktur Birokasi

Menurut Edward III, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan: a) *Standart Operating Prosedures* (SOP); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan dan b) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.¹²

¹² *Ibid.*, hlm 149-154

B. Supervisi Pembelajaran

1. Definisi Supervisi

Istilah supervisi berasal dari bahasa latin “*supervideo*” yang artinya mengawasi (*oversee*), atau menilai kinerja bawahan. Berkaitan dengan istilah Supervisi, Mulyasa menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya sering digunakan secara begantian dengan istilah pengawasan, pemeriksaan dan inspeksi. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.¹³

Supervisi merupakan salah satu strategi untuk memastikan bahwa seluruh langkah pada proses penyelenggaraan dan semua komponen hasil pendidikan yang akan dicapai memenuhi target. Supervisi adalah strategi manajemen yang terdiri atas serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa mutu yang diharapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi memenuhi *standart* yang telah ditentukan.

Konsep supervisi modern dirumuskan oleh Kimbal Wiles sebagai berikut “*supervisions is asistence in the development of a better teaching learning situation*”. Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar (*goal, material, technique, method, teacher, student an environment*). Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi.¹⁴

Dari konsep diatas mengandung maksud bahwa supervisi dilakukan pada semua kegiatan belajar mengajar baik dari sisi hasil,

¹³ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 67.

¹⁴ Makawimbang, Jerry H, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm. 70.

materi yang disampaikan, teknik yang digunakan, metode belajar mengajar, pengajar/pendidik yang memeberikan materi, siswa yang menerima materi, dan lingkungan atau situasi dan kondisi belajar mengajar baik didalam ruangan maupun diluar ruangan. Supervisi merupakan pendampingan dalam seluruh kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta *goal* yang bermutu sesuai yang diharapkan atau sesuai dengan visi dan misi suatu lembaga. Lembaga yang dimaksud bisa lembaga pendidikan itu sendiri maupun lembaga departemen pendidikan nasional.

Kita harus memahami dulu tentang apa yang dimaksud dengan supervisi. Supervisi atau biasa disebut dengan pengawasan merupakan dua istilah yang diterjemahkan dari salah satu fungsi manajemen, yaitu *controlling*. Terdapat dua pandangan yang berbeda terhadap makna kedua istilah ini. Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa kedua istilah ini sama makna dan pendekatannya. Sedangkan di sisi lain ada yang mengatakan istilah pengawasan lebih bersifat otoriter atau direktif, sedangkan istilah supervisi lebih bersifat demokratis.

Namun secara etimologi supervisi di ambil dari perkataan Inggris *Supervision* artinya pengawasan¹⁵. Supervisi pendidikan berarti pengawasan di bidang pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut *supervisor* atau pengawas. Dalam bidang pendidikan disebut *supervisor* pendidikan.¹⁶

Secara morfologi supervisi berasal dari dua kata yaitu super dan visi. Super berarti atas, lebih, visi adalah lihat, tilik, awasi. Jadi seorang *supervisor* memang mempunyai posisi atas atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang disupervisi, tugasnya adalah

¹⁵ Wojowasito, S. dan W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris*, Hasta, Jakarta, 1972, hlm. 198.

¹⁶ Luluk Nur Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, Penerbit Teras, Jogjakarta, 2009, hlm. 3.

melihat, menilik, atau mengawasi orang-orang yang disupervisi¹⁷. Secara morfologi supervisi adalah proses melihat, menilik, mengawasi oleh orang-orang yang disebut *supervisor*, yang notabene jabatannya lebih tinggi dari yang diawasi dan juga mempunyai kemampuan dan keilmuan yang lebih tinggi dari yang diawasi. Di dunia pendidikan bisa dimaknai tentang kependidikan baik secara lembaga maupun individual mampu mengarahkan kepada visi yang dijadikan tujuan dalam pendidikan, dengan hasil dari melihat, menilik atau mengawasi. Sehingga akan terjadi peningkatan mutu pendidikan dari waktu ke waktu, karena adanya suatu perbaikan yang terus menerus sesuai dengan masanya.

Adam dan Dickey telah merumuskan supervisi sebagai suatu pelayanan khususnya menyangkut pengajaran dan perbaikannya menyangkut proses mengajar dan belajar termasuk segala faktor dalam situasi itu. “ *Supervition is a services particulary concered with instruction and it’s improvement. It is directely concered with teaching and learning and with the factors included in and related to these process-teacher. Pupil, curriculum, materials of instruction. Sicio-physical environment of the situation* ”.¹⁸

Rumusan yang disampaikan oleh Adam & Dickey tersebut, supervisi merupakan sebuah pelayan atau *service* orang yang disupervisi. Seorang *supervisor* harus melayani kebutuhan dari yang disupervisi, yang dimaksud pelayan disini adalah pendamping yang selalu memberikan arahan dan masukan agar menjadi yang lebih baik. Dalam pendidikan seorang *supervisor* atau pengawas bukan hanya membina namun juga melayani atau mendampingi yang disupervisi baik kepala sekolah, guru, atau siswa dalam proses usaha mencapai tujuan pendidikan.

¹⁷ Ametembun, N.A, *Supervisi Pendidikan*, Penerbit Suri, Bandung, 1981, hlm. 2.

¹⁸ Adam, H.F. and Dickey F.G, *Basic Principles of Supervision*, New York : American Book Company, 1959, hlm. 2.

Namun, Willes juga merumuskan tentang supervisi: *supervision is assistance in the development of better teaching-learning situation*¹⁹. Dalam hal supervisi ini Willes berpendapat bahwa supervisi adalah bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Maksudnya, seorang *supervisor* atau pengawas pendidikan tidak hanya mengawasi tapi juga memberikan bantuan terus menerus kepada yang disupervisi atau yang diawasi (kepala sekolah, guru, atau siswa) untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan suatu lambang atau mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dan budi pekerti (BP). Proses memberikan bantuan ini juga diperhatikan tentang perkembangan kurikulum yang dilaksanakan dan situasi kondisi yang disupervisi, jadi dalam mensupervisi perlu adanya humanisasi oleh *supervisor* kepada yang disupervisi.

Istilah supervisi baru muncul kurang lebih tiga dasa warsa terakhir ini. Sebelumnya ada istilah *Inspeksi* yang berasal dari Belanda yang berasal dari kata *inspecteur*. Dan orang yang melakukan inspeksi ini dinamakan “Inspektur”. Yaitu yang bertugas mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sekolah-sekolah²⁰. Jadi, sebelum istilah supervisi muncul ada istilah inspeksi yang perbedaannya adalah kalau Inspeksi adalah kegiatan inspektur antara lain :

- a. *Controlling* yaitu memeriksa semua peraturan – peraturan, rencana – rencana atau instruksi – instruksi yang telah ditetapkan oleh atasan, apakah sudah terlaksana sebagaimana mestinya.
- b. *Correcting* yang berasal dari kata *correct* berarti benar atau membenarkan/membetulkan. Sedangkan *correcting* adalah memeriksa apa yang dijalankan telah sesuai dengan sesuatu yang telah digariskan atau ditetapkan artinya sasaran atau tujuan.

¹⁹ Wiles, Kimball, *Supervision for Better Schools*, New Jersey: Prentice Hall, 1956, hlm. 8.

²⁰ Ibid, hlm. 8.

- c. *Judging* yaitu mengadili dalam arti memberikan penilaian atau keputusan sepihak.
- d. *Directing* pengarahan atau pembinaan dengan maksud menentukan garis – garis dan cara – cara yang harus dilaksanakan oleh yang disupervisi.
- e. *Demonstration* yaitu memperlihatkan atau menunjukkan bagaimana cara atau metode mengajar dengan baik

2. Supervisi Pembelajaran

a. Pengertian supervisi pembelajaran

Dalam bidang pendidikan, supervisi mengandung konsep umum yang sama namun disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Supervisi pembelajaran merupakan bagian dari supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pembelajaran adalah peningkatan mutu pembelajaran melalui perbaikan mutu dan pembinaan terhadap profesionalisme guru.

Supervisi pembelajaran diartikan sebagai serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencaipan tujuan pembelajaran. Ada tiga konsep pokok dalam pengertian supervisi pembelajaran, yaitu 1) Supervisi pembelajaran harus secara langsung mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam proses pembelajaran. 2) Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya harus didesain secara official, jelas kapan mulai dan kapan mengakhiri program pengembangan pengembangan tersebut. 3) Tujuan akhir supervisi pembelajaran adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi proses pembelajaran bagi para siswanya.²¹

Supervisi pembelajaran sebagaimana dijelaskan diatas dalam faktanya belum tentu pada masing-masing madrasah atau

²¹ Mukhtar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, Referensi, Jakarta, 2013, hlm. 55-56

sekolah kepalanya mengerti dan menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya yaitu memberikan bantuan dan bimbingan kepada guru, yang lebih menyedihkan lagi apabila kepala madrasah dengan sengaja tidak mau memberikan kegiatan supervisi kepada guru bahkan sebaliknya mereka kepala sekolah menganggap guru adalah yang paling bertanggung jawab pada pekerjaannya dengan tanpa harus disupervisi.

Betapa pentingnya kegiatan supervisi pembelajaran yang harus diberikan kepala sekolah kepada guru, Sahertian mendefinisikan supervisi pembelajaran sebagai usaha menstimulasi dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual maupun kolektif. Teori ini menekankan bahwa sasaran supervisi pengajaran adalah perbaikan situasi belajar. Dalam kata lain supervisi juga diartikan sebagai usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru-guru untuk memperbaiki pengajaran, menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran.²²

Pendapat senada juga disampaikan oleh Tim Dosen UPI mereka menjelaskan bahwa pada hakikatnya supervisi pengajaran diartikan sebagai bimbingan professional bagi guru-guru. Bimbingan professional yang dimaksudkan adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara professional, sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar murid-murid. Dapat diartikan bahwa

²² *Ibid*, hlm. 55-56

supervisi adalah layanan yang berhubungan dengan pengajaran dan perbaikannya.²³

Pandangan diatas secara eksplisit dapat kita tangkap bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan bertanggung jawab memberikan bimbingan secara professional, artinya dalam menjalankan kegiatan supervisi kepala sekolah harus memiliki keilmuan yang cukup untuk kegiatan tersebut, selain itu juga mampu melakukan startegi serta cara-cara secara efektif agar dalam memberikan supervisi dapat diterima dan memberikan kemanfaatan bagi guru, dan yang lebih penting lagi adalah pada saat kepala menemukan ketidaksesuaian guru dalam mengajar, kepala sekolah mampu memberikan beberapa solusi alternatif supaya guru mampu menyelesaikan masalahnya secara tuntas.

Kegiatan professional kepala sekolah juga didukung oleh pendapat Mantja bahwa supervisi pengaaran adalah semua usaha yang sifatnya membantu guru atau melayani guru agar ia dapat memperbaiki, mengembangkan, dan bahkan meningkatkan pengajarannya, serta dapat pula menyediakan kondisi belajar murid yang efektif dan efisien demi pertumbuhan jabatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan.²⁴

Menurut Sergiovanni, supervisi pengajaran yaitu serangkaian kegiatan membantu guru mengelola pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. Variabel supervisi pengajaran selanjutnya dapat dioperasionalkan kedalam beberapa indicator sebagai berikut; (1) Kompetensi supervisor dalam membantu guru (2) Bimbingan yang diberikan supervisor (3) Tindak lanjut pembinaan dari supervisor. Pengukuran variable ini dilakukan

²³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, Alfabeta Bandung, 2010, hlm. 17

²⁴ Willem Mantja, *Materi Buku Ajar Supervisi Pengajaran*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2012, hlm. 6

dengan menggunakan alat ukur kuesioner tertutup dimana option jawaban tersedia dalam lima pilihan. Lebih lanjut Sergiovani juga mengatakan bahwa supervisi pembelajaran adalah sebagai usaha mendorong, mengkoordinir, dan menstimulir serta menuntun pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan disuatu sekolah baik secara individual maupun kelompok agar lebih efektif melaksanakan fungsi pembelajaran.²⁵

Guru sebagai seorang pendidik, pengajar, pembimbing, pembina siswa merupakan profesi yang sangat membutuhkan upaya pengembangan. Guru juga sebagai komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara terus menerus. Hal tersebut menjadikan penentu keberhasilan sebuah pendidikan melalui pembelajaran yang bermutu, sehingga ditangan gurulah berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran. Sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalitas guru dapat dilakukan sebuah pengawasan atau supervisi, terlebih lagi supervisi yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah/madrasah.

Adams dan Dickey seperti yang dikutip oleh Syaiful Sagala bahwa supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Program itu dapat berhasil jika supervisor memiliki ketrampilan (*skill*) dan cara kerja yang efisien dalam membangun kerjasama dengan guru dan petugas pendidikan lainnya.²⁶ Dengan ketrampilan yang baik diharapkan kepala sekolah dapat memberikan layanan kepada guru-gurunya sehingga guru dapat memerikan layanan yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Sebaik apapun pengalaman yang dimiliki guru tanpa dibarengi dengan pengembangan ketrampilan terus menerus maka

²⁵ Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*, Jakarta, Alfabeta, 2013, hlm. 3.

²⁶ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 124

guru akan mengalami kejumuhan dan kurang *update* sementara disisi lain guru diharuskan dinamis dengan pengetahuan dan pengalaman baru sehingga guru dapat produktif.

Ditambahkan pula oleh Ikbal Barlian bahwa supervisi pendidikan merupakan suatu kegiatan pengawasan, tepatnya pembinaan yang dilakukan atasan yaitu kepala dinas pendidikan dan staf, pengawas sekolah, kepala dan wakil kepala sekolah, termasuk juga pengurus yayasan jika itu lembaga pendidikan swasta. Supervisi terhadap pendidik dilakukan sebagai usaha sadar untuk membantu dan melayani pendidik dalam meningkatkan kompetensinya atau profesionalitasnya.²⁷

Supervisi mutlak harus dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah, dilaksanakan secara berkala, berkesinambunga, ataupun secara incidental (pada kesempatan tertentu). Peranan kepala sebagai supervisor juga sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu sekolah. Keberhasilan sekolah atau madrasah sangat ditentukan pada kualitas kepemimpinan serta kemampuan manajerial kepala sekolah atau madrasah. Maka menurut Ikbal selayaknya kepala sekolah dengan penuh kesungguhan melaksanakan kegiatan supervisi secara professional.²⁸ Kepala sekolah berkewajiban memberikan bantuan kepada bawahannya secara kontinyu.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ngalim Purwanto, yang menyebutkan bahwa supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tetuju pada kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Supervisi ini berupa dorongan, bimbingan dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru seperti bimbingan

²⁷ Ikbal Barlian, *Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi*, Esensi Erlanga, Palembang, 2013, hlm. 65.

²⁸ *Ibid*, hlm. 66.

dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat dan metode mengajar yang lebih baik, cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya.²⁹

Pendapat di atas nampak jelas bahwa kepala madrasah harus mampu membina dan mengarahkan segala potensi yang dimiliki agar guru-guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Bentuk – bentuk lain dalam pengembangan kualitas guru selain pemberian supervisi kepala madrasah adalah kegiatan pelatihan-pelatihan keterampilan mengajar guru. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kisbiyanto bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas pendidikan lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk dalam mengembangkan guru-guru, merivisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan penilaian pengajaran.³⁰

Supervisi secara umum diartikan bantuan yang diberikan kepada orang lain (bawahan) agar ia dapat melaksanakan dan meningkatkan fungsi dan tugasnya.³¹ Bentuk kegiatan supervisi yang dilakukan di sekolah adalah bimbingan dan layanan bantuan kepala sekolah atau madrasah kepada guru-guru dalam melaksanakan tugasnya mulai dari merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran, selain itu bentuk supervisi kepala madrasah atau sekolah kepada staf karyawan adalah membantu dan membimbing staf dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dengan kata lain supervisi dari atasan kepada bawahan

²⁹ Herabudin, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Pustaka Setia*, Bandung, 2009, hlm. 195.

³⁰ Kisbiyanto, *Supervisi Pendidikan*, STAIN Kudus, Kudus, 2008, hlm. 3

³¹ AR. Efendi, Loc. cit

diharapkan dapat memberikan suasana agar dapat melaksanakan serta mengoptimalkan kerja atau tugas yang diterimanya.

Sedangkan supervisi pembelajaran adalah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi, baik personel maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan.³²

Hal demikian belum tentu berjalan dengan baik, karena dalam kenyataannya praktik kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah tidak selalu sama dengan yang seharusnya (*das sollen*), kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik hanya datang ke sekolah dengan membawa instrument pengukuran unjuk kerja guru yang sedang mengajar. Setelah itu, selesailah tugasnya, seakan-akan supervisi akademik sama dengan pengukuran guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan minimnya pembinaan dalam kegiatan pengembangan kegiatan guru (*das sein*).

Menurut Mukhtar tugas supervisor adalah membantu guru-guru memperbaiki situasi pembelajaran dalam arti luas. Dalam rangka menganalisis kurikulum yang diterapkan di sekolah, maka kepala sekolah selaku supervisor adalah membantu para guru dalam meningkatkan profesi guru dalam memahami strategi pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun strategi pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun berbagai pengalaman belajar dan keaktifan belajar, serta meningkatkan keterampilan dasar mengajar yang dimiliki oleh guru. Dalam supervisi pembelajaran terdiri dari :

1. Penilaian hasil pembelajaran, dengan indikator :

³² Ngalim Purwanto, Loc. Cit.

- a. Penentuan dan analisis tujuan-tujuan dengan kritis secara kooperatif;
 - b. Analisis data untuk menemukan kekuatan dan kelemahan pada hasil pendidikan;
 - c. Seleksi dan penerapan cara-cara penilaian
2. Penerapan situasi pembelajaran untuk menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan prestasi siswa, dengan indikator :
- a. Mempelajari pedoman bidang-bidang studi dan kurikulum dalam pelaksanaan
 - b. Mempelajari alat pengajaran, perlengkapan, dan lingkungan sosial fisik dari belajar dan pertumbuhan.
 - c. Mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelajaran yang terdapat pada guru (kepribadian guru, pendidikan akademis dan professional, kebiasaan bekerja).
 - d. Faktor-faktor yang terdapat pada siswa atau peserta didik (kesanggupan, minat, motivasi, kebiasaan belajar, perkembangan intelektual, dan lain-lain).
3. Memperbaiki situasi pembelajaran, dengan indikator :
- a. Memperbaiki pedoman mengajarkan bidang-bidang studi dan mengembangkan bahan instruksional, termasuk menyusun kerangka mata pelajaran, buku pelengkap, dan bahan cetak lain.
 - b. Memperbaiki alat pembelajaran, perlengkapan, dan lingkungan sosial

- c. Memperbaiki perbuatan (*performance*) guru dengan penggunaan teknik-teknik supervisi yang sesuai, baik yang bersifat individual maupun kelompok.³³

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan supervisi pembelajaran adalah sebuah usaha atau program untuk memperbaiki pengajaran atau pembelajaran sebagai bentuk pengawasan untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan.

- b. Fungsi dan Tujuan Supervisi Pembelajaran

- 1) Fungsi Supervisi Pembelajaran

Fungsi supervisi menurut Sahertian antara lain : (1) mengkoordinasi semua usaha sekolah, (2) melengkapi kepemimpinan sekolah, (3) memperluas pengalaman guru-guru, (4) menstimulasi usaha-usaha sekolah, (3) memperluas pengalaman guru-guru, (4) menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, (5) member fasilitas dan penilaian yang terus menerus, (6) menganalisis situasi belajar mengajar dan (7) memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada setiap anggota staf.³⁴

Supervisi pembelajaran mempunyai fungsi seperti disebutkan diatas, maka selayaknya kepala sekolah melaksanakan supervisi pembelajaran dengan baik, karena diharapkan guru atau semua bawahannya dapat melaksanakan tugas dengan optimal.

³³ Mukhtar, Loc. Ct.

³⁴ Kisbiyanto, *Op. Ct*, hlm. 11

2) Tujuan Supervisi Pembelajaran

Tujuan supervisi secara umum menurut Kisbiyanto adalah mengembangkan situasi belajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar.³⁵

Tujuan diadakannya supervisi kepada para pendidik menurut Miftah adalah dalam rangka:³⁶

- a) Membina pendidik agar lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional.
- b) Membina pendidik agar mereka lebih menyadari serta mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi para peserta didiknya pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan, sehingga pendidik dapat membantu peserta didik menjadi lebih paham terhadap materi yang disampaikan.
- c) Menemukan kelebihan dan kelemahan masing-masing pendidik dan memanfaatkan hasil temuan tersebut untuk mengembangkan kemampuan pendidik yang bersangkutan, dengan cara memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya.
- d) Membina para pendidik untuk meningkatkan kemampuan unjuk kerja di depan kelas.
- e) Membina pendidik yang masih tahap belajar dalam masa orientasi agar dapat segera menyesuaikan diri dengan tugasnya dan mendayagunakan kemampuannya secara maksimal.

³⁵ Kisbiyanto, *Ibid*, hlm 9.

³⁶ Ikkal, *Op, Cit.*, hlm. 67.

- f) Membina pendidik menemukan kesulitan belajar yang dihadapi para peserta dan merencanakan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan pembelajaran.

Membina para pendidik untuk menghindari tuntutan-tuntutan yang ditujukan mereka diluar batas kewajaran, baik tuntutan itu datangnya dari dalam maupun di luar sekolah.

C. Teknik – Teknik Supervisi Pembelajaran

1. Teknik – Teknik Supervisi Pembelajaran

Supervisi hendaknya memilih teknik-teknik supervisi yang tepat sesuai dengan tujuan yang dicapai. Adanya teknik supervisi yang dapat dipilih dan digunakan supervisor baik yang bersifat kelompok maupun individual. Menurut Ngalm Purwanto teknik supervisi yang digunakan oleh kepala sekolah dapat dibagi dua yaitu teknik perseorangan dan teknik kelompok.

a. Teknik Perseorangan (Individual)

Dalam teknik perseorangan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain :

1) Mengadakan kunjungan kelas (*class room visitation*)

Kunjungan kelas yaitu kunjungan sewaktu-waktu yang dilakukan oleh seorang supervisor (kepala sekolah, penilik, pengawas). Tujuannya untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat didaktik atau metode yang sesuai. Kegiatan ini untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya masih perlu diperbaiki dalam proses belajar mengajar.

2) Mengadakan kunjungan observasi (*observasi visits*)

Kepala sekolah menugaskan guru untuk melihat atau mengamati seorang guru yang sedang mendemonstrasikan

cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya cara menggunakan alat atau media yang baru, seperti sosiodrama, problem solving, diskusi panel, fish bowl, metode penemuan (*discovery*), dan sebagainya. Kunjungan observasi dapat dilakukan sendiri (*instrashool visit* atau dengan mengadakan kunjungan ke sekolah lain (*interschool visits*).

- 3) Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa dan atau mengatasi problema yang dialami siswa.

Banyak masalah yang dialami guru dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa. Misalnya siswa yang nakal, siswa yang mengalami perasaan rendah diri dan kurang dapat bergaul dengan teman-temannya dan siswa yang lamban dalam belajar. Meskipun di beberapa sekolah mungkin telah dibentuk bagian bimbingan dan konseling untuk mengatasinya, tapi tidak lepas dari guru karena mereka adalah pembimbing yang utama.

- 4) Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah, antara lain :
 - a) Menyusun program semester
 - b) Menyusun atau membuat program satuan pelajaran
 - c) Mengorganisasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas
 - d) Melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran
 - e) Menggunakan media dan sumber dalam proses mengajar
 - f) Mengorganisasikan kegiatan - kegiatan siswa.

Kegiatan supervisi tersebut, disamping dapat dilakukan dengan teknik perseorangan, dapat juga dengan teknik kelompok bergantung pada tujuan dan situasinya.

b. Teknik Kelompok

Dalam teknik ini supervisi dilakukan secara kelompok. Adapun kegiatan ini dapat dilakukan antara lain :

1) Mengadakan pertemuan atau rapat (*meeting*)

Seorang kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusunnya. Salah satu isi perencanaan tersebut adalah mengadakan rapat-rapat secara periodic dengan guru-guru. Berbagai hal dapat dibicarakan dalam rapat. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, pembinaan administrasi atau tata laksana sekolah.

2) Mengadakan diskusi kelompok (*group discussions*)

Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Kelompok-kelompok yang telah terbentuk diprogramkan mengadakan pertemuan atau diskusi guna membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha pengembangan proses belajar mengajar. Di dalam setiap diskusi supervisor atau kepala sekolah dapat memberikan pengarahan, bimbingan, nasehat-nasehat atau saran-saran yang diperlukan.

3) Mengadakan penataran (*In-Service Trainng*)

Teknik supervisi kelompok dilakukan melalui penataran sudah banyak dilakukan. Misalnya penataran untuk guru-guru bidang studi tertentu. Penataran tentang metodologi pengajaran dan penataran tentang administrasi pendidikan.³⁷

³⁷ Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Rosdakarya, Bandung, 2004, Bandung, hlm. 32.

D. Prinsip – Prinsip Supervisi Pembelajaran

Prinsip – prinsip pelaksanaan supervisi agar efektif menurut Miftah antara lain :

1. Supervisi pembinaan pada pendidik haruslah bersifat konstruktif dan kreatif, yang dilaksanakan dalam bentuk hubungan konsultatif dan demokratis, bukan hierarkis.
2. Supervisi pembinaan harus berdasarkan pada beberapa sumber kolektif dari beberapa orang dalam kelompok, tidak hanya dari usaha supervisor sendiri.
3. Supervisi pembinaan harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi atau kolejial.
4. Supervisi pembinaan harus dapat mengembangkan segi-segi kelebihan pada yang dipimpin untuk mengatasi kelemahannya.
5. Supervisi pembinaan harus dapat memberikan perasaan aman pada para pendidik yang dibina, baik bagi dirinya maupun pada kelompoknya.
6. Supervisi pembinaan harus progresif dan sesegera mungkin.
7. Supervisi pembinaan harus didasarkan pada keadaan yang riil/sebenarnya.
8. Supervisi pembinaan harus sederhana dan informal dalam pelaksanaanya.
9. Supervisi pembinaan harus objektif dan sanggup mengadakan *self evaluation*.³⁸

Sedangkan prinsip-prinsip dalam supervisi pembelajaran menurut Kisbiyanto antara lain :

1. Ilmiah (*scientific*) yang berarti harus sistematis yaitu dilaksanakan secara teratur, berprogram dan kontinu, obyektif yaitu berdasar pada data dan informasi, menggunakan instrument yang dapat member data atau

³⁸ Ikbal Barlian, Op. Cit., hlm. 65.

informasi sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran.

2. Demokratis, yaitu menjunjung tinggi asa musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain.
3. Kooperatif, yaitu mengembangkan uaha bersama untuk menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik.
4. Konstuktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif dalam menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik.³⁹

E. Pendekatan dalam supervisi pembelajaran

Pendekatan yang dilakukan dalam supervisi pembelajaran sangat fleksibel atau tidak kaku, namun pola yang umum dapat dilakukan dengan tiga kategori (1) pendekatan tradisional dan tanggung jawab administratif; (2) pendekatan informal dan tanggung jawab guru; (3) pendekatan *intermediate* dan tanggung jawab supervisi.⁴⁰

F. Bentuk (pola) supervisi pembelajaran

1. Supervisi umum

Kegiatan supervisi mempunyai lingkungan yang sangat luas, maksudnya adalah kegiatan supervisi tidak hanya kegiatan-kegiatan di dalam kelas, namun juga di luar kelas. Dengan pengertian pengawasan atau supervisi mempunyai jangkauan sasaran yang cukup luas, maka kegiatan-kegiatan di dinamakan dengan supervisi umum. Pengawasan atau supervisi dilakukan untuk memajukan pendidikan walaupun di luar kelas sekalipun. Jadisupervisi umum merupakan supervisi yang ruang lingkupnya cukup luas, bukan hanya berbentuk fisik⁴¹. Supervisi umum ini juga menyangkut tentang keperluan sarana, misalnya kebutuhan ruang

³⁹ Kisbiyanto, *Op. Cit*, hlm. 10

⁴⁰ Syaiful Sagala, *Op.cit*, hlm. 127

⁴¹ Muslim, Sri Banun, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Guru*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 95.

belajar, mobil antar jemput, bangunan gedung dan sebagainya⁴². Semuanya itu merupakan wilayah supervisi umum⁴³.

Kurikulum 2013 dikenal dengan supervisi akademik, karena materi-materi pelatihan supervisi yang diprogramkan adalah supervisi akademik, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebab dalam pembelajaran kurikulum 2013 mengedepankan proses dalam pembelajaran.

2. Supervisi proses belajar mengajar (PBM)

Supervisi proses belajar mengajar (PBM) merupakan bentuk supervisi yang berada di dalam komunitas kelas, maksudnya supervisi ini sasarannya langsung pada kegiatan belajar mengajar yang disebut supervisi kelas. Dalam pelaksanaan supervisi ini bisa dilakukan dengan model supervisi klinis. Sebab dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas yang ada hubungan antara guru dan siswa. Pada supervisi PBM ini yang tepat adalah dengan model supervisi klinis.⁴⁴ Dalam implementasinya supervisi klinis memberi tekanan pada : a) proses supervisinya b) interaksi guru dengan siswa c) performansi guru saat mengajar d) hubungan guru dengan *supervisornya* e) analisis data berdasarkan peristiwa aktual di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Supervisi klinis ini memang bersifat humanistik atau biasa disebut kemanusiaan, dimana seorang pendidik atau guru mempunyai tanggung jawab kepada siswa dan kepada *supervisornya*. Kepada siswa, guru harus memberikan pelajaran sesuai dengan situasi, potensi dan kondisi dalam belajar mengajar (KBM) di kelas. Performansi guru juga sangat

⁴² Neagley, R.L, Evans, N.D, *Handbook for Effective Supervision of Instruction*, Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall. 1980, Inc, hlm. 32.

⁴³ Muslim, Sri Banun, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Guru*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 96.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 21.

menunjang keberhasilan KBM. Kemudian kepada supervisor dalam hal ini kepala sekolah, guru senior dan pengawas PAI. Guru sebagai salah satu unsur penggerak dalam meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah, diharapkan adanya perubahan kearah perbaikan yang terus menerus.

3. Supervisi kolegial atau kesejawatan

Supervisi kolegial atau kesejawatan adalah teknik supervisi yang bersifat kelompok yang membahas tentang kekurangan pada supervisi individual yang didapat oleh guru ketika disupervisi secara individual. Maksudnya ketika dalam supervisi individual ada kurang yang sempurna dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi guru, maka diselesaikan di dalam kelompok yang di dalamnya terdapat guru yang bersangkutan dan *supervisor*.⁴⁵

Selain itu, supervisi kolegial ini juga sangat diperlukan oleh guru dan sekolah karena perkembangan jumlah sekolah yang semakin meningkat dan jumlah guru pun semakin banyak, ketersediaan *supervisor* atau pengawas sangat terbatas. Maka dalam kondisi seperti ini di perlukannya supervisi kolegial atau supervisi kelompok. Karena supervisi individual sulit untuk dilaksanakan disebabkan oleh keterbatasan waktu yang tersedia.

Munculnya supervisi kelompok tersebut diilhami oleh *team teaching* (mengajar secara berkelompok). Kegiatan ini bisa artikan bahwa suatu persoalan atau masalah dapat di pecahkan secara berkelompok dalam satu kelompok yang telah di bentuk oleh guru sendiri, *supervisor* mengkomunikasikan penyelesaian masalah secara bersama dengan guru- guru dalam kelompok tersebut⁴⁶. Supervisi

⁴⁵ Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 22.

⁴⁶ Neagley, R.L, Evans, N.D, *Handbook for Effective Supervision of Instruction*. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall. Inc, 1980, hlm. 10.

kelompok tersebut dapat di implementasikan melalui : KKG (kelompok kerja guru), MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), MKKKS (musyawarah kelompok kerja kepala sekolah) dan lain-lain. Selain mengkomunikasikan, seorang *supervisor* dalam supervisi kolegial ini bertugas melatih para guru untuk menganalisa performansi mereka sendiri dan teman guru yang lain. Sehingga ada introspeksi antara guru satu dengan yang lain dalam rangka perbaikan pendidikan dikemudian hari.

Teori *humanistic relations* bahwa kelompok atau organisasi adalah sumber insani yang vital yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap organisasinya atau kelompoknya⁴⁷. Para guru termotivasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman gurunya, contohnya, ketika mengerjakan tugas mengajar ada problem, maka dalam kegiatan kelompok tersebut akan terbentuk saling asah, asih dan asuh. Maksudnya saling memberi solusi dan *share* dengan teman seprofesinya.

Supervisi kolegial ini pun bisa dipakai model supervisi artistik yaitu model supervisi yang mendasarkan diri pada bekerja untuk orang lain (*working for the other*), bekerja dengan orang lain (*working with the other*), dan bekerja melalui orang lain (*working trough the other*). Model supervisi artistik menuntut seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, berketrampilan, dan tidak kaku karena dalam kegiatan supervisi juga mengandung nilai seni.

G. Kegiatan Supervisi Pembelajaran Kepala Sekolah

Kegiatan – kegiatan yang harus dilakukan kepala sekolah dalam rangka supervisi kepada para pendidik menurut Ikbal antara lain :

1. Mengadakan observasi kelas ketika pendidik melaksanakan pembelajaran untuk peningkatan efektivitas pembelajaran sebagai tindak lanjut.

⁴⁷ Muslim, Sri Banun, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Guru*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 108.

2. Melaksanakan pertemuan individual secara professional dengan para pendidik untuk meningkatkan profesionalitas para pendidik, apabila belum ditemukan kepehaman.
3. Menyediakan waktu dan pelayanan bagi para pendidik secara professional dalam pemecahan masalah-masalah pembelajaran.
4. Menyediakan dukungan moral, sarana dan prasarana, dalam suasana kondusif bagi para pendidik untuk perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran yang dilakukannya.
5. Melaksanakan pengembangan para pendidik secara terarah melalui pendidikan dan pelatihan serta pengimbasan ilmu kepada para pendidik lainnya.
6. Melaksanakan kerja sama dengan para pendidik untuk mengevaluasi hasil belajar secara komprehensif.
7. Menciptakan *teamwork* yang dinamis dan professional.
8. Menggunakan hasil belajar para peserta didik secara komprehensif sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan para pendidik dalam melaksanakan pembelajaran setelah diadakannya supervisi.
9. Memanfaatkan hasil pembinaan sebagai proposal dan laporan hasil penelitian sederhana.

Selain yang diuraikan di atas, disebutkan pula kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka supervisi pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan gagasan, prosedur, dan bahan material untuk menilai dan mengembangkan kurikulum.
2. Mengembangkan pedoman, petunjuk, cara dan bahan penunjang lainnya untuk melaksanakan kurikulum.
3. Merencanakan perbaikan metode proses belajar secara formal melalui penataran, lokakarya, seminar, sanggar kerja, diskusi dan kunjungan dinas.
4. Membina dan mengembangkan organisasi profesi.

5. Membina, membimbing dan mengarahkan guru-guru pada peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melaksanakan proses belajar mengajar.
6. Menilai kurikulum, sarana prasarana dan prosedur berdasarkan tujuan pendidikan.⁴⁸

Program supervisi disekolah menurut Syaifu Sagala adalah program pengembangan guru yang kegiatannya dirancang dengan tema-tema yang berkisar pada penyajian informasi tentang suatu jenis pendekatan, membantu guru memahami informasi, membantu guru mengaplikasikan pemahaman pengajaran dan membantu guru memahami tingkat pengetahuan serta integrasi nilai dan sikap.

Supervisi pendidikan, meliputi (1) menilai dan membina guru dan seluruh staf sekolah dalam bidang teknis edukatif dan administratif; (2) usaha mencari, mengembangkan dan mempergunakan berbagai metode belajar mengajar yang lebih baik dan sesuai untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik; (3) mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah, peserta didik dan pegawai sekolah; (4) mengembangkan kerja sama antara kelompok kerja guru, musyawarah guru.⁴⁹

Bidang – bidang tugas supervsi menurut Ben. M. Haris seperti ditulis Kisbiyanto adalah sebagai berikut :⁵⁰

Tabel 2.1 Bidang – Bidang Tugas Supervisi

No	Bidang Tugas	Keterangan
1	Mengembangkan kurikulum	Mendesain kembali apa yang diajarkan, siapa yang mengajar, bagaimana polanya, membimbing pengembangan kurikulum, menciptakan standar, merencanakan unit

⁴⁸ Kisbiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 9

⁴⁹ Syaiful Sagala, *Op. Cit.* hlm. 125.

⁵⁰ Kisbiyanto, *Op. Cit.* hlm. 33.

		pengajaran dan melembagakan mata pelajaran
2	Pengorganisasian pengajaran	Mengelola murid, staf, ruang belajar, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara koordinatif dengan efektif dan efisien
3	Pengadaan staf	Menyediakan staf pengajaran dengan jumlah yang cukup sesuai kompetensi bidang pengajaran dan melakukan pembinaan secara terus – menerus.
4	Penyediaan fasilitas	Mendesain perlengkapan dan fasilitas untuk kepentingan pengajaran
5	Penyediaan bahan pengajaran	Penyediaan bahan-bahan memilih dan mendesain yang digunakan dan diimplementasikan untuk pengajaran
6	Penyusunan penataran pendidikan	Merencanakan dan mengimplementasikan pengalaman-pengalaman belajar untuk memperbaiki kemampuan staf pengajaran
7	Pemberian orientasi anggota staf	Memberi informasi pada staf atas bahan dan fasilitas yang ada untuk melakukan tanggung jawab pengajaran
8	Pelayanan murid	Memberikan pelayanan yang optimal terhadap murid untuk mengembangkan pertumbuhan belajar
9	Hubungan masyarakat	Memberi dan menerima informasi dari masyarakat untuk meningkatkan pengajaran

10	Penilaian pengajaran	Penilaian terhadap rencana pengajaran dan implementasinya, menganalisis data dan menginterpretasikannya, mengambil keputusan dan melakukan penilaian hasil belajar.
----	----------------------	---

Ditambahkan pula menurut Soetisna, secara spesifik program supervisi pembelajaran meliputi (1) membantu guru secara individual dan secara kelompok dalam memecahkan masalah pengajaran/pembelajaran; (2) mengkoordinasikan seluruh usaha pengajaran/pembelajaran menjadi perilaku edukatif yang terintegrasi dengan baik; (3) menyelenggarakan program latihan yang berkesinambungan bagi guru-guru; (4) mengusahakan alat-alat yang bermutu dan mencukupi bagi pembelajaran; (5) membangkitkan dan memotivasi kegairahan guru yang kuat untuk mencapai prestasi belajar kerja yang maksimal; (6) membangun hubungan yang baik dan kerjasama antara sekolah, lembaga sosial, dan instansi terkait serta masyarakat.⁵¹

Jika manusia dapat memiliki kecakapan dasar yang merupakan syarat utama, diharapkan akan dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang baik. Sergiovanni dan Starrat mengemukakan supervisor pengajaran atau pembelajaran seharusnya membantu perbaikan pengajaran, namun kenyataannya supervisor pengajaran bekerja lebih menekankan bantuan langsung untuk memperbaiki pengajaran. Diharapkan pekerjaan supervisor merupakan kebutuhan bagi setiap untuk melakukan penyegaran melaksanakan tugas pengajaran dengan efektif.⁵²

H. Implementasi Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti (BP) Kelas 7 Kurikulum 2013

1. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti

Pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan

⁵¹ Syaiful Sagala, *Op. Cit.*, hlm. 124-125.

⁵² Syaiful Sagala, *Ibid.*

ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti dilembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau/mushola, dirumah dan sebagainya.⁵³ Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai Guru. Sedangkan dimaksud dengan guru agama adalah “orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan memberikan pertolongan terhadap mereka dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar menacapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah swt maupun sebagai makhluk sosial serta makhluk individu yang mandiri.”⁵⁴

Mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan satu diantara mata pelajaran yang tercantum dalam semua kurikulum dan perlu kita ketahui, bahwa untuk mendefinisikannya dari sisi bahasa dan istilah pendidikan agama Islam (PAI) hampir sama di setiap kurikulum yang berlaku di Indonesia berbeda tipis.

Seperti halnya dengan *definisi* pendidikan agama Islam dalam Kurikulum 2004 "pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta mengamalkannya”.

Menurut para ahli, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran Islam (*knowing*), terampil melakukan atau mempraktikan ajaran Islam (*doing*), dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (*being*).

Menurut Ahmad D. Marimba, “ pendidikan agama Islam adalah

⁵³ M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 2003, hlm. 122.

⁵⁴ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Rosdakarya, Jakarta, 2003, hlm. 163.

bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain sering kali beliau mengatakan kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai agama Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pendapat di atas selaras dengan pendapat M. Yusuf Al-Qardhawi “ pendidikan agama Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya. Karena itu, pendidikan agama Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan proses pembelajaran manusia seutuhnya yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Dan juga pendidikan agama Islam ialah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim yang sejati. Jika direnungkan syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus didirikan melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan.

Seiring dengan perkembangan zaman maka pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah formal seperti SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA mengalami perkembangan dengan di berlakukannya kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 pendidikan agama Islam (PAI) dalam penyebutan judul buku mata pelajarannya pendidikan agama Islam (PAI) dan budi pekerti (BP). Pada kurikulum 2013 proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SML/SMA/SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah (*santific*

approach) yaitu *standart* proses, dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, mempertanyakan, mengolah menyimpulkan dan mencipta.⁵⁵

2. Tujuan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti

Pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakteristik dan moral dari peserta didik. Pendidikan agama Islam banyak memuat materi-materi yang mengharuskan siswanya untuk tidak hanya mempelajari PAI dari *knowledge* saja, tetapi juga pada aspek afektif, dan psikomotorik.

Tujuan pendidikan agama Islam ialah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah usaha atau kegiatan selesai. Karena usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang terbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya.⁵⁶

Pengembangan kurikulum 2013 bertujuan untuk menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan efektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana) dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi. Di kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti penekanannya pada pembelajaran berbasis efektif dan psikomotorik yang sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan (*relegious culture*) di sekolah.

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang meningkatkan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia itu mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

⁵⁵ Imas Kurinasih dan Berlin Sani, *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep & Penerapan*, Sura Kata Pena, Surabaya, 2014, hlm. 46.

⁵⁶ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 29.

Visi pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah mewujudkan manusia yang bertaqwa kepada Allah swt dan ber akhlaq mulia serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan produktif, baik secara personal maupun sosial.

3. Implementasi pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013

Implementasi kurikulum 2013 sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 81 A memerlukan perhatian dan usaha yang serius untuk memastikan implementasi tersebut dapat dilakukan sesuai yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang *Standart* Kepala Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang Kepala Sekolah/Madrasah harus mampu melakukan supervisi akademik dalam bentuk bimbingan, arahan dan pembinaan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum.

Kurikulum 2013 menuntut guru pendidikan agama Islam memiliki respon, inovasi dan kreasi khususnya dalam pembelajaran. Guru PAI dalam konteks ini bukan pengguna tetapi sebagai pencipta pembelajaran. Mereka harus mengeksplor berbagai sumber belajar di sekitar untuk dijadikan sebagai media pembelajaran peserta didik. Pada kurikulum 2013 proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran dijenjang SMP/SMA/SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah (*saintific approach*), yaitu *standart* proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, mempertanyakan, mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta.⁵⁷

Dalam proses pembelajaran yang menjadi ciri kurikulum 2013 adalah :

- a. *Standart* proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi,

⁵⁷ Imas Kurinasih dan Berlin Sani, *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep & Penerapan*, Kata Pena, Surabaya, 2004, hlm. 46.

dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.

- b. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di *lingkungan* sekolah dan masyarakat
- c. Guru bukan satu-satunya sumber belajar
- d. Sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan.⁵⁸

Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif .

Implementasi kurikulum 2013 mempunyai tujuan yang telah di sebutkan di atas dengan melibatkan berbagai pihak antara lain; masyarakat (wali murid dan lingkungan sekolah), kepala sekolah dan guru. Hal ini tercantum dalam peraturan menteri pendidikan nasional No. 105 tahun 2014 pasal 2 ayat 2, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran :

- a. pengawas satuan pendidikan;
- b. kepala satuan
- c. pendidik

Permendiknas No. 105 diatas merupakan beberapa personal yang secara aturan mendampingi serta mengawal Implementasi kurikulum 2013. Dengan syarat pada pasal 3 dalam peraturan yang sama yaitu : pendampingan dilakukan berdasarkan prinsip: a.

⁵⁸ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 128.

profesional, b. kolegal, c. sikap saling percaya dan d. berkelanjutan”.

Pada kurikulum 2013, guru dituntut profesional merancang pembelajaran afektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Berkaitan dengan hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :⁵⁹

- a. Merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna
- b. Mengorganisasikan pembelajaran
- c. Memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran
- d. Melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi, dan karakter.

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah faktor penentu dalam implementasi kurikulum 2013. Sebab kepala sekolah yang menggerakkan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia di sekolah tersebut. Untuk mencapai keberhasilan kurikulum 2013 maka dibutuhkan kepala sekolah yang demokratis profesional. Maksudnya adalah seorang kepala sekolah yang mandiri, demokratis, profesional dengan menanamkan, memajukan dan meningkatkan empat macam nilai yaitu pembinaan mental, moral, fisik dan artistik.

Kepala sekolah itu sebaiknya jangan dijabat seseorang yang lemah, terutama dalam mengambil keputusan, menentukan kebijakan, atau yang berprinsip pokoknya jalan. Posisi atau jabatan kepala sekolah sebaiknya dijabat oleh orang yang memiliki dinamika, yang memiliki ide, pengetahuan, dan pengalaman melakukan *sharing*. Sebagai pemimpin pendidikan kepala sekolah diharapkan mampu melaksanakan tugas sebagai “*Educational Statemanship*”.⁶⁰

⁵⁹ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 99 – 125.

⁶⁰ E. Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 54-55.

Kepala sekolah merupakan seorang manajer di sekolahnya. Ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran di sekolah. Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.

Kepala sekolah, sebagai manajer berfungsi sebagai *otorisator*, dan dilimpahi fungsi ordinator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordinator untuk menguji hak atas pembayaran.⁶¹

Kemudian dalam mensukseskan implementasi kurikulum 2013 guru merupakan salah satu faktor yang signifikan. Namun guru atau tenaga kependidikan juga harus mempunyai karakteristik masing-masing. Karakteristik guru dalam mengembangkan pembelajaran secara aktif dapat diidentifikasi sebagai berikut: respek dan memahami dirinya, serta mengontrol dirinya (emosi stabil), antusias dan bergairah terhadap bahan, kelas, dan seluruh kegiatan pembelajaran, berbicara dengan jelas dan komunikatif (dapat mengkomunikasikan idenya terhadap peserta didik).

Memperhatikan perbedaan individual peserta didik yang memiliki banyak pengetahuan, inisiatif, kreatif, dan banyak akal. Menghindari ejekan terhadap peserta didik. Tidak menonjolkan diri dan menjadi suri tauladan bagi peserta didik, dalam singkatan bahasa jawa guru berasal dari digugu dan ditiru. Maksudnya sosok guru adalah orang yang bicaranya mengandung nasehat dan tingkah lakunya patut ditiru.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 87.

Komponen selanjutnya adalah peserta didik, dengan meningkatkan kedisiplinan peserta didik terutama disiplin diri (*self-discipline*). Dengan demikian guru harus mampu membantu peserta didik dalam mengembangkan pola pikirnya (*mindset*), meningkatkan *standart* perilakunya (moral/akhlak) dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin dalam aktivitasnya.

I. Penelitian yang relevan

Beberapa penelitian yang relevan saat ini antara lain:

- a. **“Implementasi kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah Ibnu Taimiyah Bogor”**. yang di tulis oleh Moch. Yasykur. Hasil penelitiannya antara lain Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah *leer plan*. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih populer ketimbang *curriculum* (bahasa inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Peran kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau madrasah adalah sangat penting dan menentukan dalam pencapaian tujuan pendidikan sehingga kurikulum memiliki peran yang strategis. Ada tiga peranan kurikulum yang sangat penting, yaitu peranan *konservatif*, peran kreatif dan peran kritis/*evaluative*. Perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam *control* atau *filter social*. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kin dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan.⁶²

⁶² Moch. Yasykur, Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah Taimiyah Bogor, *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 03, Januari 2014, hlm. 550.

- b. “Implementasi pengembangan kurikulum 2013 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 4 Jember”** oleh Hj. Titiek Rohanah Hidayati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengembangan kurikulum 2013 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 4 Jember yang meliputi; perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. pada kurikulum 2013 di SMA Negeri 4 Jember. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kurikulum 2013 di SMA Negeri 4 Jember. Evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kurikulum 2013 di SMA Negeri 4 Jember. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, implementasi perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kurikulum 2013 meliputi program tahunan, program semester, program mingguan dan harian, program remedial dan pengayaan kedua implementasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kurikulum 2013 meliputi pembinaan keakraban dan pre test, pembentukan kompetensi, dan post test, ketiga implementasi evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kurikulum 2013 meliputi penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Namun secara umum pengembangan kurikulum 2013 pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 4 Jember dipandang dari sistem perencanaan, pelaksanaan sudah maksimal namun pada sistem penilaian masih kurang maksimal.⁶³
- c. Implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Karanganyar.**

⁶³ Titiek Rohanah Hidayati, Implementasi Pengembangan Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 4 Jember, *Implementasi Pengembangan Kurikulum 2013*, Fenomena Vol 14 No. 1 April 2015, hlm. 1.

Yang ditulis oleh Anita Sari NIM (2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk lokasi penelitian di SMK Negeri 1 Karanganyar pada tahun 2014. Subyek penelitiannya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan siswa. Hasil penelitiannya adalah implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti berjalan cukup baik dengan di buktikan adanya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang di realisasikan dengan baik sesuai dengan langkah-langkah dan strategi pembelajaran yang baik. Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) telah menerapkan pendekatan *scientific*. Penilaiannya sudah menerapkan penilaian *ountetik*. Dari sisi hambatan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah a) guru belum memahami kurikulum 2013, b) belum ada buku pegangan guru maupun siswa, c) jumlah kelas terbatas sehingga terjadi *moving kelas* pada setiap pergantian mata pelajaran, d) belum adanya laboratorium PAI, e) belum adanya modul yang di buat oleh guru. Solusinya; a) guru diberi pelatihan-pelatihan kurikulum 2013, b) sekolah berusaha untuk melengkapi sarana dan pra sarana baik berupa material maaupun non material seperti pengadaan laboratorium PAI, penambahan kelas agar tidak ada *moving kelas* serta pembuatan modul oleh guru-guru PAI.⁶⁴

- d. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) dalam membentuk karakter Islam siswa di SMK Negeri 4 Jember Tahun Pelajaran 2012/2013.** Oleh Maslahatul Himmah. Fokus penelitian ini meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum PAI dalam membentuk karakter islami siswa yang mencakup aspek ibadah dan akhlak di SMK Negeri Jember, yang meliputi sekumpulan materi dan apa saja dialami peserta didik atau segala upaya (rekayasa) atau

⁶⁴ Anita Sari, Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Karanganyar, *Implementasi Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti*, Fenomena Vol 20 No. 2 April 2014, hlm. 3.

pengalaman belajar yang diprogramkan di sekolah.⁶⁵

- e. Problematika guru pendidikan agama Islam (PAI) dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di Kota Kediri.** Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa : a) implementasi kurikulum 2013 di Kota Kediri belum berjalan dengan maksimal masih ada kekurangan yang harus diperbaiki contohnya, saja pendampingan dalam implementasi itu sangat kurang, kekurangan lebih terlihat di nasional dan akhirnya kurikulum 2013 oleh menteri pendidikan dan hanya beberapa sekolah yang menjadi percontohan kurikulum 2013 di Kota Kediri, b) problematika guru PAI antara lain mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran, karena kurangnya pemahaman guru tentang kurikulum 2013 dengan konsep pembelajaran kurikulum 2013. Guru PAI belum mempunyai persiapan yang cukup matang untuk melaksanakan penerapan kurikulum 2013, keterlambatan pengadaan pelatihan bagi guru-guru, khususnya guru PAI tentang kurikulum 2013 seperti *workshop*, pelatihan-pelatihan bagi guru, sosialisasi kurikulum 2013, dan sebagainya terakhir sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan kurikulum 2013 di beberapa yang ada di Kota Kediri, sehingga menghambat pelaksanaan kurikulum yang diterapkan.⁶⁶

J. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Dari penelitian terdahulu atau relevan di atas, kita bisa mengambil persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti ;

a. Persamaan

Jurnal yang ditulis peneliti sebelumnya sama-sama pokok pembahasannya tentang implementasi kurikulum 2013, dikaitkan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, sebab mata pelajaran PAI lebih

⁶⁵ Maslahatul Himmah, Pengembangan Kurikulum PAI dalam Membentuk Karakter Islam Siswa di SMK Negeri 4 Jember Tahun Pelajaran 2012/2013, *Pengembangan Kurikulum PAI*, Fenomena Vol 35 No. 4 Januari 2013, hlm. 5.

⁶⁶ Arif Hidayatullah, Wahidul Anam dan Moh. Zainal Fanani, Problematika Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 di Kota Kediri, *Problematika Guru PAI*, Fenomena Vol 35 No. 13 Maret 2013, hlm. 1.

mengedepankan aspek karakter, sesuai dengan yang ada di aspek penilaian kurikulum 2013, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan.

b. Perbedaan

Peneliti juga menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, jurnal di atas lebih difokuskan pada supervisi implementasi kurikulum 2013 yang mana dalam supervisi lebih ditekankan pada administrasi pembelajaran mencakup Prota, Promes, Silabus, RPP, PTS, PAS/PAT.

Sedangkan, tesis yang ditulis peneliti lebih difokuskan implementasi/penerapan mata pelajaran PAI dan budi pekerti, mensupervisi bapak/ibu guru ketika mengajar dikelas, RPP nya, penilaian kurikulum 2013, dan juga memberi solusi dan hambatan kepada bapak/ibu guru mengalami kesulitan dalam pembelajaran kurikulum 2013.

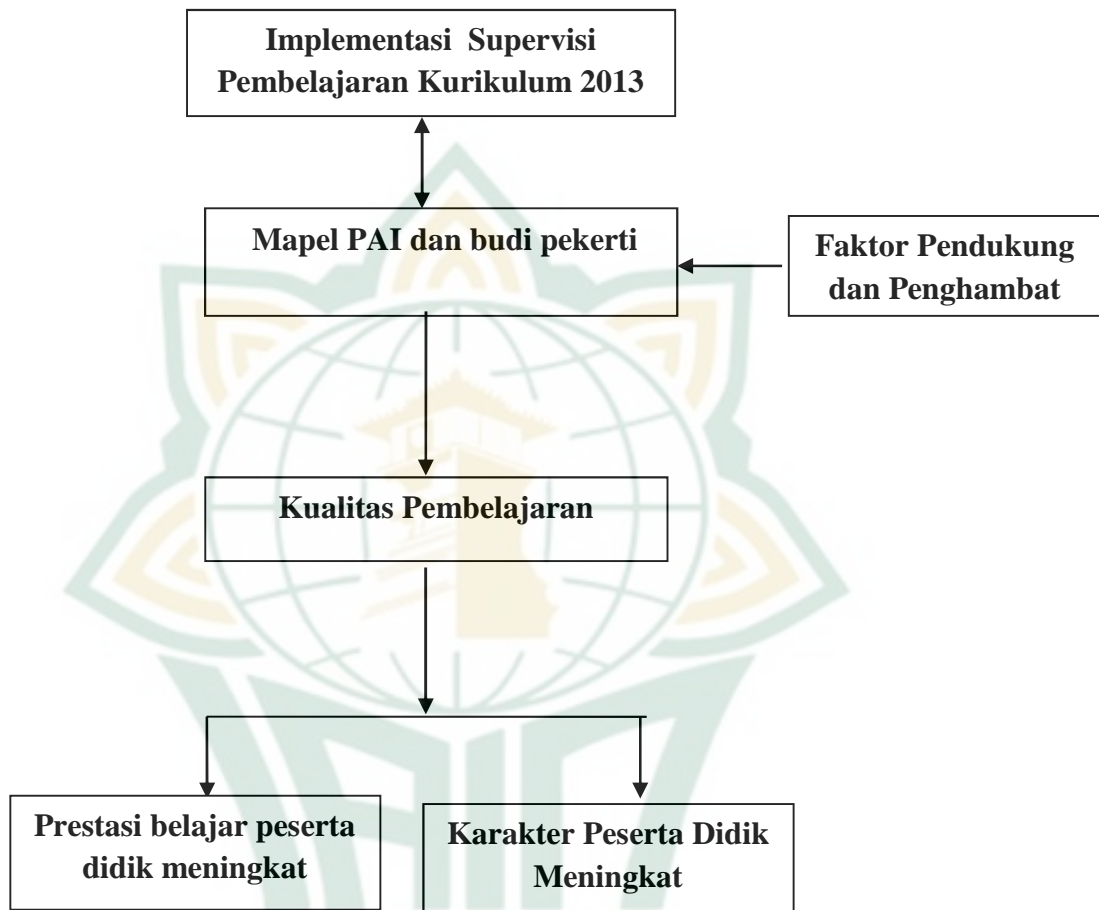
K. Kerangka Berfikir

Pengajaran adalah pemindahan pengetahuan dari seorang guru yang mempunyai pengetahuan kepada orang lain yang belum mengetahui. Pengetahuan yang dipindahkan tersebut berasal dari dua sumber Illahi dan sumber manusiawi.⁶⁷ Pemindahan tersebut dilakukan melalui proses belajar mengajar, dimana terjadi interaksi di antara pengajar dengan pelajar. Agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik maka dibuatlah suatu sistem pengajaran yang berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan dalam pendidikan agama Islam.

Pengajar dan belajar merupakan dua komponen pokok dalam pembelajaran. Keduanya memiliki tujuan yang hendak di capai, yaitu sesudah mengikuti proses belajar mengajar, pelajar dapat menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu sesuai dengan proses mengajar tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh tentang implementasi pendidikan agama islam dalam proses pembelajaran maka terdapat dua terminologi yang perlu diperjelas yaitu belajar dan mengajar. Menguasai dan mengembangkan

⁶⁷ Departemen Agama RI., *Kendali Mutu PAI*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Yogyakarta, 2001, hlm. 25.

bahan pengajaran komponen yang terlibat antara lain pelajar, materi yang di ajarkan, dan metode yang di gunakan dalam memberikan pelajaran.



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

Gambar di atas merupakan alur kerangka berfikir implementasi supervisi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, perlu diketahui bahwa supervisi yang dilakukan di sekolah perlu adanya kerjasama antara guru bidang studi PAI dengan yang mensupervisi, sebab guru bidang studi yang mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didiknya, setiap minggu mengajar dan juga tidak menutup kemungkinan setiap hari bertemu. Ketika melakukan supervisi alangkah baiknya mengetahui faktor pendukung dan penghambat, sebab keberhasilan dalam proses belajar mengajar sangatlah penting, faktor pendukung disini dimaksudkan dari sekolahan mendukung

kaitannya proses kegiatan belajar mengajar PAI, misalnya buku paket, media, laboratorium, dan lain-lain

Sedangkan, faktor penghambat dimaksudkan, setiap siswa mempunyai daya pemikiran yang berbeda, ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang lama merespon pelajaran, ini menjadi tantangan bagi guru PAI untuk melakukan pendampingan agar proses pembelajaran tidak menjadi masalah dalam menerima materi pelajaran. Kualitas pembelajaran sangatlah penting, ini menentukan kenyamanan di dalam kelas, apabila di dalam kelas merasa nyaman peserta didik mudah untuk menerima pelajaran, setelah kualitas pembelajaran di perhatikan, dengan sendirinya prestasi peserta didik akan meningkat, siswa merasa senang mengikuti pelajaran, akan tetapi faktor lingkungan sekolah disini juga sangat berpengaruh, semua ini bisa terlaksana apabila di dukung lingkungan yang baik, mulai dari sekolah, gurunya, dan lain sebagainya.

Kurikulum 2013 mengedepankan berbasis karakter, ini relevan sekali dengan implementasi supervisi pembelajaran mata pelajaran PAI dan budi pekerti, seperti kita ketahui pendidikan agama Islam menekankan pada perilaku anak, karakter disini akan sulit diwujudkan apabila semua pihak tidak saling membantu. Dengan adanya implementasi supervisi pembelajaran PAI dan budi pekerti di SMP IT Asshodihiyah Semarang, apalagi sekolah berbasis pondok pesantren, penulis berharap karakter lebih harus di kedepankan, agar peserta didik menjadi kebanggaan sekolah pada umumnya, dan orang tua khususnya.